

# **Implementasi Kebijakan Pedoman Wisata Berkelanjutan pada Objek Wisata Air Panas Cisolong Kabupaten Pandeglang (Studi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021)**

**Flipins Pande Hasiholan Lumban Toruan<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[flipinsphlt123@gmail.com](mailto:flipinsphlt123@gmail.com)

**Kandung Sapto Nugroho<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## **ABSTRACT**

*Sustainable tourism has become a key foundation for creating a safe and comfortable environment at the Cisolong Hot Springs tourist destination. However, visitors have expressed various concerns regarding the quality of facilities and overall comfort within the area, including damaged pool infrastructure and inadequate sanitation conditions. This study aims to examine the implementation of the Minister of Tourism and Creative Economy Regulation Number 9 of 2021 by applying the policy implementation framework proposed by Van Meter and Van Horn. The framework identifies six key variables that influence the success of policy implementation: (1) policy standards and objectives; (2) resources; (3) inter-organizational relationships; (4) characteristics of implementing agencies; (5) social, political, and economic conditions; and (6) the disposition or attitudes of policy implementers.. Based on the analysis and findings obtained in the field, the researcher concluded that the implementation of the Minister of Tourism and Creative Economy Regulation Number 9 of 2021 concerning guidelines for sustainable tourism in the Pandeglang Regency hot spring tourist attraction, which is located at the Pandeglang Regency Tourism Office, especially in the management of sustainable tourism in the Cisolong hot spring tourist attraction, is still not optimal.*

**Keywords: Implementation, Sustainable Tourism.**

## **LATAR BELAKANG**

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor ini tidak hanya berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan, peningkatan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, pariwisata dapat dipahami sebagai fenomena pergerakan manusia secara temporer untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu, yang kemudian mendorong aktivitas konsumsi serta produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan melalui pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah yang berbasis

pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, destinasi wisata, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama internasional, pemberdayaan usaha kecil, serta pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara bertanggung jawab (Kemenparekraf, 2021).

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, ditinjau dari letak geografis, kondisi alam, serta kekayaan sejarah, budaya, dan religi yang dimilikinya. Potensi tersebut merupakan modal penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemanfaatan sumber daya tersebut perlu dilakukan secara optimal melalui pengelolaan pariwisata yang terencana, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, memperluas kesempatan kerja, mendorong pembangunan wilayah, serta memperkenalkan daya tarik wisata kepada masyarakat luas, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan keagamaan.

Salah satu destinasi wisata yang terdapat di wilayah ini adalah Pemandian Air Panas Cisolong yang berlokasi di Kecamatan Kaduhejo. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, pengelolaan objek wisata ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pengelolaan yang efisien serta minimnya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia saat ini meliputi beberapa kamar rendam privat, kolam pemandian, toilet, kantin, dan area parkir. Di sisi lain, objek wisata ini memiliki nilai tambah berupa manfaat kesehatan, karena kandungan sulfur dalam air panasnya yang dipercaya memiliki khasiat terapeutik bagi berbagai penyakit, seperti gangguan kulit dan tulang.

Namun demikian, pengembangan objek wisata ini masih menghadapi berbagai kendala. Sejak berdiri pada tahun 2011, masih terdapat keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya wahana pendukung wisata. Selain itu, akses menuju lokasi juga belum memadai, ditandai dengan kondisi jalan yang rusak serta minimnya penerangan jalan umum, yang dapat menghambat kenyamanan dan keamanan pengunjung, khususnya pada malam hari.

Di samping itu, persaingan dengan objek wisata serupa yang dikelola oleh pihak swasta juga menjadi tantangan tersendiri. Destinasi wisata yang dikelola swasta cenderung menawarkan fasilitas yang lebih menarik dan inovatif dibandingkan dengan objek wisata yang dikelola pemerintah. Permasalahan lain yang turut memengaruhi pengelolaan wisata antara lain adanya praktik pungutan liar, rendahnya tingkat kenyamanan, minimnya inovasi, kurang optimalnya peran masyarakat lokal dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis), keterbatasan fasilitas umum, serta belum maksimalnya kegiatan promosi pariwisata di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian penerapan pedoman wisata berkelanjutan pada objek wisata Pemandian Air Panas Cisolong, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi dapat diartikan sebagai proses penyediaan sarana dan upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan menghasilkan dampak atau konsekuensi tertentu. Kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, maupun kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam karya *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (1975), implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa terdapat enam faktor utama yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Menurut Meter dan Horn (1975), keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

4. Sikap (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*).

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut memonitor keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

## Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika, dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dinilai memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena dalam konteks alami, dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam situasi yang wajar. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas yang tinggi serta memungkinkan peneliti berperan secara lebih dominan dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga mampu menghasilkan gambaran yang lebih realistis terhadap kondisi di lapangan.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka teoretis dan realitas empiris terkait implementasi kebijakan. Fokus kajian diarahkan pada implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Wisata Berkelanjutan pada objek wisata Air Panas Cisolong.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 di Wisata Air Panas Cisolong dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa proses implementasi tersebut memiliki berbagai tantangan signifikan yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Pertama, tujuan untuk mengetahui ukuran dari Peraturan-peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Wisata Berkelanjutan ialah untuk menjadikan tempat wisata tertata rapi sesuai peraturan tersebut serta menjadi pedoman untuk para pegawai di instansi dan di tempat wisata khususnya pegawai yang berhubungan langsung dengan Wisata. Kedua, standarisasi keberhasilan menjadi tujuan dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman wisata berkelanjutan yaitu seluruh pegawai khususnya yang bersentuhan langsung dengan arsip mulai menerapkan semua yang ada pada peraturan tersebut, mulai dari keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, pengelolaan berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi. Pertama, terdapat kekurangan pegawai di dinas pariwisata yang berperan khusus untuk menangani serta mengurus wisata air panas Cisolong di kantor dinas pariwisata. Karena, selama ini hanya diurus oleh staf benrim yang merangkap sebagai penghubung kepada pengelola wisata air panas Cisolong dan kurang paham dengan pedoman wisata berkelanjutan. Kedua, kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang terdapat di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang mengenai pengelolaan wisata berkelanjutan

masih kurang baik, mereka hanya pernah mendengar dan hanya mengetahui tentang Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tanpa mengetahui isi dari Peraturan tersebut, sehingga harus diberikan pelatihan khusus bagi pegawai dikantor dinas pariwisata Pandeglang untuk mempelajari bagaimana seharusnya melakukan sosialisasi tentang Wisata Berkelanjutan.

### 3. Hubungan Antar Organisasi

Implementasi atau pelaksanaan sebuah program kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi guna menunjang keberhasilan suatu program kebijakan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat, maka asumsinya akan semakin sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi. Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman wisata berkelanjutan, ada satu organisasi yang terlibat langsung yaitu Pengelola wisata air panas pemda yang menjalin kontrak dengan dinas pariwisata. *Implementator* atau pelaksana dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman wisata berkelanjutan hanya ada 2 yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang dan Pengelola Wisata Air Panas Cisolong.

### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin pada aturan dan sanksi hukum, seperti halnya kebijakan publik yang bertujuan untuk mengubah perilaku dasar manusia. Namun pada konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan ketika menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Karakter agen pelaksana dengan dasar Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman wisata berkelanjutan sudah amat baik, dari dinas pariwisata kabupaten Pandeglang maupun pengelola Cisolong selalu mendukung untuk kemajuan Wisata Air Panas Cisolong.

### 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, dalam menjalankan kebijakan dengan baik, maka kondisi pegawai pun harus dengan kondisi baik pula, khususnya kondisi ekonomi dan sosial pegawai, pengelola air panas dan masyarakat ikut terbantu

meningkat dalam perekonomian dan di dalam lingkup sosial juga semua merasa nyaman dan selalu koordinasi.

#### 6. Disposisi/Sikap *Implementor*

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal terakhir yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn dapat memengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka perlu memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka perlu mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan yang telah diperoleh di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman wisata berkelanjutan di wisata air panas Kabupaten Pandeglang, berlokasi di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang khususnya dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di wisata air panas Cisolong belum maksimal.

## REFERENSI

Anoa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik, 1(01), 17–28.  
<https://doi.org/10.51454/anoa.v1i01.111>

Dr. H. Tachjan, M.Si.(2006). Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit AIPI Bandung. Juwita Marpaung, V. F., & Nawangsari, E. R. (2024). Upaya Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sedudo Melalui Pendekatan *Community Based Tourism* di Desa Ngliman Kabupaten Nganjuk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1084–1092. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2006>

Kemendparekaf. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kemendparekaf, 2–75.

Kemendparekaf. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kemendparekaf, 2–75.

## MANUSIA DALAM PARIWISATA BERKELANJUTAN ( STUDI KASUS : OBJEK WISATA

Muhammad, F. J., Irawati, I., & Halimah, M. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 63–83. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.13234>

Nasional, S., Snpk, K., Pratiwi, R., & Ruspianda, R. (2006). TANTANGAN SUMBERDAYA PEMANDIAN AIR PANAS DESA SUNGAI PINANG ) Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuantan Singingi upaya mewujudkan desa yang mandiri . Melalui program ini setiap desa da. 132–144.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D: Bandung. Alfabeta

Fatmawati L, S., Setiadi, A., & Rahman, R. A. (2023). Perencanaan & Perancangan Kawasan Wisata Pantai Taipa Berdasarkan Pedoman Permenparekraf No 9 Tahun 2021.